

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Perkembangan Inflasi Sulsel

Pada triwulan I 2026, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi 0,59% (mtm), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm) pada triwulan IV 2025. Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi Sulsel sampai dengan triwulan I 2026 tercatat sebesar 2,11% (ytd) dengan inflasi tahunan sebesar 4,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Nasional yang mencatatkan inflasi 3,48% (yoy). Inflasi triwulan I 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pangan strategis terutama hortikultura, telur ayam ras, dan daging ayam ras akibat keterbatasan pasokan di tengah meningkatnya permintaan pada periode HBKN Idul Fitri. Inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh deflasi emas perhiasan seiring menurunnya harga emas global, serta deflasi angkutan udara sejalan dengan pemberian diskon tarif angkutan udara oleh pemerintah. Secara tahunan, inflasi didorong oleh kenaikan harga emas global sebesar 47,54% (mtm) dan low base effect akibat diskon tarif listrik 50% pada awal 2025. Memperhatikan perkembangan tersebut, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi tahunan pada triwulan I 2026 sebesar 4,50% (yoy), lebih tinggi dari rentang sasaran inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Secara bulanan, inflasi di Sulsel terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini tercatat inflasi sebesar 1,95% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 1,34% (mtm) yang didorong oleh keterbatasan pasokan cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan di tengah tingginya permintaan periode HBKN Idul Fitri. Lebih lanjut, cuaca yang kurang kondusif turut mengganggu produktivitas hortikultura (cabai rawit & tomat). Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga komoditas pada Kelompok Transportasi dengan andil 0,03% yang bersumber dari bensin dan angkutan antar kota, sejalan dengan kenaikan harga bensin nonsubsidi pada triwulan I 2026. Namun demikian, inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar -0,06% (andil mtm) dipengaruhi penurunan harga emas perhiasan seiring menurunnya harga emas global.

Seiring berakhirnya periode HBKN Idul Fitri, tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan April 2026 diperkirakan berada pada rentang -0,19% s.d. 0,61% (mtm). Adapun rata-rata inflasi bulan April dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,73% (mtm). Tekanan inflasi diperkirakan lebih landai dibanding periode sebelumnya. Hal ini oleh berlanjutnya periode panen raya padi, dengan produksi diperkirakan meningkat sebesar 13,44% menjadi 861,66 ribu ton dari 759,56 ribu ton pada bulan sebelumnya, seiring tingginya realisasi panen pada Maret yang mendorong ketersediaan pasokan pada April. Perbaikan pasokan tersebut diperkirakan memberikan dampak signifikan dalam meredam tekanan inflasi mengingat beras memiliki bobot ketiga terbesar dalam struktur inflasi Sulsel (4,42%). Selain itu, normalisasi pola konsumsi pasca-periode HBKN Idul Fitri yang full impact pada Maret 2026 dan berakhirnya stimulus konsumsi pasca pencairan THR diperkirakan turut mendorong inflasi lebih landai. Lebih lanjut,

kondisi gelombang laut pada April 2026 relatif kondusif pada kategori rendah (0-0,5 meter) yang dapat mendukung aktivitas perikanan tangkap. Disisi lain, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rentang sedang-lebat berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan pangan. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan tekanan harga pangan strategis terutama di daerah sentra. Namun, ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis lainnya yang masih memadai sebagaimana tercermin pada neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus dapat menahan laju inflasi.

b. Perkembangan Harga Kebutuhan

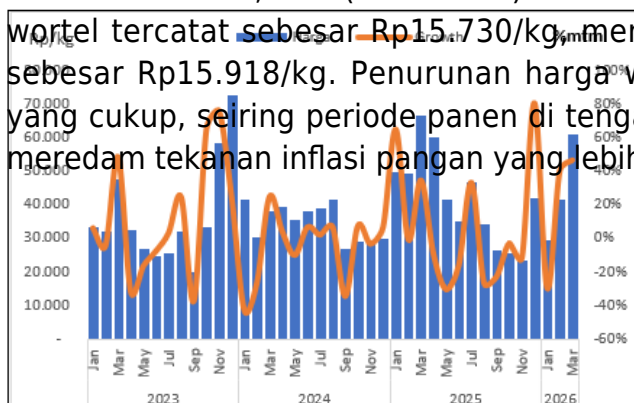
b.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan I 2026 mencatatkan inflasi dengan andil 0,61% (andil mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi dengan andil sebesar 0,41% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 1,95% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 1,34% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas cabai rawit (0,10%; andil mtm), tomat (0,06%; andil mtm), telur ayam ras (0,06%; andil mtm), dan daging ayam ras (0,05%; andil mtm). Keterbatasan pasokan seiring dengan cuaca yang kurang kondusif di tengah tingginya permintaan periode HBKN Idul Fitri. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komoditas wortel (-0,01%; andil mtm), ikan cakalang (-0,01%; andil mtm), dan ikan teri (-0,01%; andil mtm) seiring terjaganya pasokan di tengah periode permintaan HBKN.

Komoditas cabai rawit kembali menjadi komoditas tertinggi pendorong inflasi pada triwulan I 2026. Komoditas ini mencatat inflasi sebesar 25,01% (mtm) dengan andil 0,10% (andil mtm). Berdasarkan hasil survei pemantauan harga di pasar tradisional Sulawesi Selatan, rata-rata harga cabai rawit di pasar tradisional meningkat sebesar 47,00% (mtm), dari Rp41.622/kg pada Februari 2026 menjadi Rp61.182/kg pada Maret 2026. Kenaikan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan di cuaca yang kurang kondusif di tengah tingginya permintaan periode HBKN Idul Fitri.

Komoditas lainnya yang turut mencatat inflasi pada triwulan I 2026 adalah **tomat**. Tomat mencatat inflasi sebesar 34,60% (mtm) dengan andil 0,08% (andil mtm) pada triwulan I 2026. Berdasarkan hasil survei pemantauan harga di Sulawesi Selatan, rata-rata harga tomat di tingkat konsumen meningkat dari Rp8.804/kg pada Februari 2026 menjadi Rp11.143/kg pada Maret 2026, atau meningkat sebesar 26,56% (mtm). Kenaikan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat curah hujan tinggi yang mengganggu produksi, di tengah tingginya permintaan.

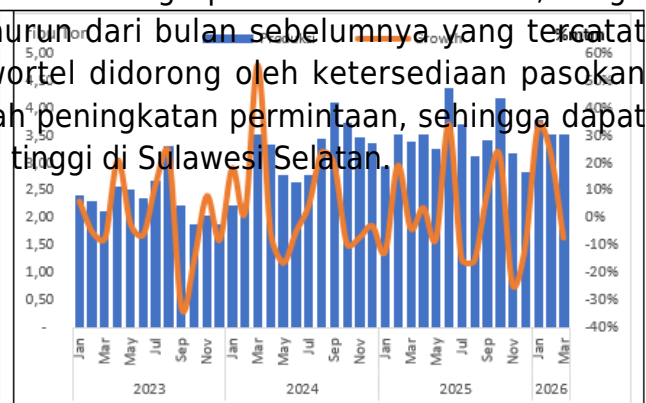
Selain itu, **telur ayam ras** juga tercatat menjadi komoditas penyumbang inflasi sebesar 5,73 (mtm) dengan andil sebesar 0,06% (andil mtm). Berdasarkan hasil survei pemantauan harga di Sulawesi Selatan, rata-rata harga telur ayam ras meningkat sebesar 4,70% (mtm), dari Rp28.719/kg pada bulan sebelumnya menjadi Rp30.070/kg pada bulan laporan. Kenaikan harga telur ayam ras tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan periode HBKN Idul Fitri.

Tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dapat tertahan oleh komoditas **wortel** yang mengalami deflasi 10,65% (mtm) dengan andil sebesar -0,01% (andil mtm). Berdasarkan harga pada level konsumen, harga wortel tercatat sebesar Rp15.730/kg, menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp15.918/kg. Penurunan harga wortel didorong oleh ketersediaan pasokan yang cukup, seiring periode panen di tengah peningkatan permintaan, sehingga dapat meredam tekanan inflasi pangan yang lebih tinggi di Sulawesi Selatan.



Sumber: Bapanas & Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4. Harga Cabai Rawit Sulawesi Selatan



Sumber: Kementan & Bapanas (diolah)

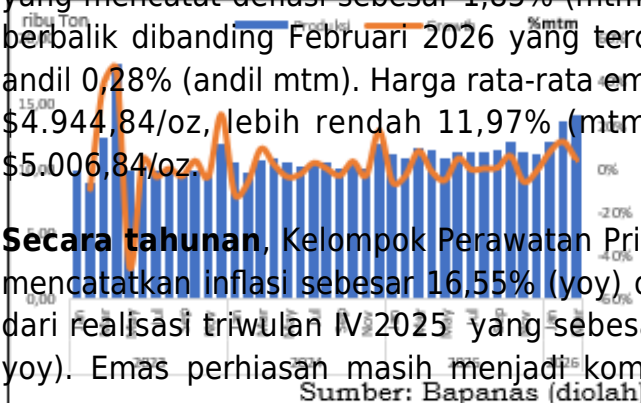
Grafik 5. Produksi Cabai Rawit Sulawesi Selatan

Selain itu, komoditas **Ikan Cakalang** juga menjadi penahan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan I 2026. Ikan Cakalang mencatatkan deflasi 0,74% (mtm) dengan andil sebesar -0,01% (andil mtm). Berdasarkan harga pada level konsumen, harga ikan cakalang tercatat sebesar Rp39.398/kg, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp39.392/kg. Penurunan harga tersebut sejalan dengan terjaganya pasokan selama periode HBKN dan terjadinya pergeseran sebagian permintaan aneka ikan ke daging ayam ras selama periode Idul Fitri.

Secara tahunan, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan I 2026 menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 5,65% (yoy) dengan andil mencapai 1,78% (andil yoy). Tekanan inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan Februari 2026 yang tercatat inflasi sebesar 6,48% (yoy) dengan andil mencapai 2,02% (andil yoy). Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan disumbangkan oleh daging ayam ras, beras, telur ayam ras, ikan layang, dan ikan bandeng. Adapun beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan wortel.

b.2. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan I 2026 memberikan andil deflasi bulanan sebesar -0,06% (andil mtm), berbalik arah dibanding realisasi triwulan IV 2025 yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,08% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,66% (mtm). Deflasi pada kelompok ini terutama dipicu oleh penurunan harga komoditas emas perhiasan yang mencatat deflasi sebesar 1,85% (mtm) dengan andil sebesar -0,05% (andil mtm), berbalik dibanding Februari 2026 yang tercatat inflasi sebesar 10,45% (mtm) dengan andil 0,28% (andil mtm). Harga rata-rata emas global pada Maret 2026 tercatat sebesar \$4.944,84/oz, lebih rendah 11,97% (mtm) dibanding Februari 2026 yang sebesar \$5.006,84/oz.

Secara tahunan, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan I 2026 mencatatkan inflasi sebesar 16,55% (yoy) dengan andil 1,32% (andil yoy), lebih tinggi dari realisasi triwulan IV 2025 yang sebesar 14,47% (yoy) dengan andil 1,12% (andil yoy). Emas perhiasan masih menjadi komoditas penyumbang inflasi utama sebesar



Grafik 7. Produksi Daging Ayam Ras Sulawesi Selatan



Grafik 8. Produksi Bawang Merah Sulawesi Selatan

71,90% (yoy) dengan andil sebesar 1,25% (andil yoy).

b.3. Di sisi lain, Kelompok Transportasi pada triwulan I 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm) dengan andil 0,03% (andil mtm), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) dengan andil 0,02% (andil mtm). Secara komoditas, tekanan inflasi terutama bersumber dari inflasi komoditas bensin dan angkutan antar kota, sejalan dengan kenaikan harga bensin nonsubsidi pada triwulan I 2026.

Inflasi pada kelompok Transportasi terutama bersumber dari inflasi komoditas bensin sebesar 0,44% (mtm) dengan andil 0,02% (andil mtm) dan angkutan antar kota sebesar 3,94% (mtm) dengan andil 0,02% (andil mtm). Inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi pada triwulan I 2026, sehingga terdapat penyesuaian harga untuk angkutan antar kota di tengah tingginya permintaan periode HBKN Idul Fitri. Namun, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh diskon tarif angkutan udara oleh pemerintah sebesar 17-18% untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026 sehingga menekan harga Angkutan Udara menjadi deflasi -2,33% (mtm).

No.	JenisBBM	Harga (Rp/liter)		Penubahan (m tm)
		Feb-26	M ar-26	
1	Pertam ax	12.100	12.600	4,13%
2	Pertam ax Turbo	13.000	13.350	2,69%
3	Dexlite	13.550	14.500	7,01%
4	Pertam ina Dex	13.800	14.800	7,25%
5	Pertam ax diPertashop	12.000	12.500	4,17%

Sumber: Pertamina, diolah

Tabel 3. Harga BBM Nonsubsidi Provinsi Sulawesi Selatan

Triwulan I 2026

Secara tahunan, Kelompok Transportasi pada triwulan I 2026 mencatatkan inflasi sebesar 0,39% (yoy) dengan andil 0,05% (andil yoy). Realisasi ini lebih rendah dari periode sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,42% (yoy) dengan andil 0,05% (andil yoy). Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh komoditas sepeda motor (0,03%; andil yoy), cuci kendaraan (0,02%; andil yoy), dan angkutan antar kota (0,01%; andil yoy).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Seiring berakhirnya periode HBKN Idul Fitri, tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan April 2026 diperkirakan berada pada rentang -0,19% s.d. 0,61% (mtm). Adapun rata-rata inflasi bulan April dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,73% (mtm). Tekanan inflasi diperkirakan lebih landai dibanding periode sebelumnya. Hal ini oleh berlanjutnya periode panen raya padi yang diperkirakan meningkat sebesar 13,44%

dibandingkan bulan sebelumnya, seiring tingginya realisasi panen pada triwulan I yang mendorong ketersediaan pasokan pada April. Perbaikan pasokan tersebut diperkirakan memberikan dampak signifikan dalam meredam tekanan inflasi mengingat beras memiliki bobot ketiga terbesar dalam struktur inflasi Sulsel (4,42%). Selain itu, normalisasi pola konsumsi pasca-periode HBKN Idul Fitri yang *full impact* pada Maret 2026 dan berakhirnya stimulus konsumsi setelah pencairan THR diperkirakan turut mendorong inflasi lebih landai. Lebih lanjut, kondisi gelombang laut pada April 2026 relatif kondusif pada kategori rendah (0-0,75 meter) yang dapat mendukung aktivitas perikanan tangkap. Sementara itu, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rentang sedang-lebat sehingga berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan pangan dan dapat meningkatkan tekanan harga pangan strategis terutama di daerah sentra. Namun, ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis lainnya yang masih memadai sebagaimana tercermin pada neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus dapat menahan laju inflasi.

Komoditas	Memas (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Ketahanan Stok (Hari)
Beras	790.364	880.415	90.051	284
Jagung	757.276	870.079	112.803	196
Palawia	5.005	6.391	1.386	54
Sawit Mentah	12.018	55.865	43.847	539
Bawang Putih	6.177	7.775	1.598	127
Cabai Besar	1.307	2.512	1.205	35
Cabai Rawit	1.406	3.898	2.492	18
Jagung Sapi/Kayu	1.021	15.935	14.914	106
Jagung Perak	1.054	67.815	9.161	213
Telur Ayam Ras	69.124	94.691	25.567	95
Gula Pasir	13.591	22.775	9.184	48
Minyak Goreng	10.808	18.028	7.220	49

Sumber: Bapanas, diolah

Tabel 4. Neraca Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I 2026

Sementara itu, sejumlah risiko tekanan inflasi pangan tetap perlu dicermati, antara lain bersumber dari masih berlangsungnya musim tanam padi serta faktor cuaca. Pada April 2026, curah hujan di Sulawesi Selatan diperkirakan berada pada kategori rendah (51-100 mm)-tinggi (401-500 mm). Kategori tinggi diperkirakan terjadi di Luwu Raya dan wilayah Toraja yang berpotensi mengganggu produktivitas komoditas hortikultura dan produktivitas padi di tengah periode panen raya.

Dalam mendorong penguatan pengendalian inflasi, TPID se-Sulawesi Selatan juga senantiasa berupaya aktif untuk memitigasi risiko tekanan melalui berbagai langkah strategis, seperti penyelenggaraan operasi pasar secara reguler di seluruh kab/kota, kegiatan sidak pasar rutin untuk monitoring perkembangan harga pangan strategis di pasar-pasar tradisional, mendorong penguatan produktivitas pertanian, penjajakan kerjasama antar daerah (KAD), dan komunikasi efektif berupa himbauan belanja bijak dan pangan mandiri.

No.	Jenis BBM	Harga (Rp/liter)		Penubahan (n tn)
		Mar-26	Apr-26	
1	Pertamax	12.600	12.600	0,00%
2	Pertamax Turbo	13.350	13.350	0,00%
3	Dexlite	14.500	14.500	0,00%
4	Pertamina Dex	14.800	14.800	0,00%
5	Pertamax Hi Octadon	12.500	12.500	0,00%

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sumber: Pertamina, diolah

K1. KETERJANGKAUAN HARGA

Tabel 5. Harga BBM Non-subsidi Provinsi Sulawesi Selatan
April 2026

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada HBKN.
2. Sidak pasar, gudang distributor, dan gudang BULOG dalam rangka pemantauan harga.
3. Koordinasi aktif antara TPID dengan stakeholders dalam review kebijakan Administered Prices di daerah.
4. Mendorong pemanfaatan dana APBD untuk program pengendalian inflasi dan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

K2. KETERSEDIAAN PASOKAN

Peningkatan produksi pangan melalui Program Luas Tambah Tanam, mandiri benih, perbaikan irigasi, termasuk implementasi varietas benih unggul.

2. Dukungan/fasilitasi alat dan mesin penunjang produksi melalui penyaluran PI-KEKDA, termasuk penerapan *digital farming* hulu pada komoditas padi maupun hortikultura (bawang merah dan cabai) untuk efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.
3. Gerakan Menanam Pangan Strategis di lingkungan kerja/pekarangan kosong (*urban farming*), misalnya Gerakan Tanam Cabai oleh ASN di Luwu Timur, Barru, Selayar Gemerlap, Gemoih di Bulukumba, dan Jeneponto Bahagia (cabai, bawang merah).
4. *Launching* Gerakan Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Barru pada lahan tadah hujan seluas 180 hektar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

K3. KELANCARAN DISTRIBUSI

1. Implementasi program SIPEPPA, yakni program kerja sama antara Pemerintah dan toko ritel untuk distribusi bahan pangan. Untuk tahun ini, akan didorong perluasan pada beberapa ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
2. Penandatanganan MoU KAD, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Optimalisasi program *Mini Distribution Center (MDC)* untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis masyarakat dengan harga terjangkau sesuai HET pada beberapa pasar di kota IHK dan akan diperluas pada kota-kota non-IHK lainnya.
4. Program peningkatan pemasaran digital (*digital farming* sisi hilir) melalui program *onboarding* UMKM pangan pada platform *e-commerce/social commerce*.

K4. KOMUNIKASI EFEKTIF

1. HLM untuk stabilisasi harga pangan secara reguler di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya untuk sinergi bersama program pengendalian inflasi pada momen HBKN.
2. Kegiatan edukasi perkembangan inflasi kepada masyarakat melalui media (siaran pers, media sosial, *media gathering*, *talk show*, dan lainnya).
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan relatif stabil dibandingkan tahun 2025 dan tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Dari sisi permintaan domestik, perbaikan daya beli masyarakat diperkirakan mendorong peningkatan konsumsi, sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,2%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun 2024 yang sebesar 6,5%. Permintaan juga didukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mencapai 100% penerima dari total target pada tahun 2026 sehingga dapat meningkatkan permintaan pangan strategis. Dari sisi *administered prices*, tekanan

inflasi berpotensi mengalami tekanan akibat dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi seiring gangguan pasokan minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko kembali menambah tekanan inflasi ke depan. Selain itu, kondisi ENSO yang diperkirakan akan memasuki El Nino Lemah pada semester II 2026 berpotensi memberikan iklim yang kering dan mengganggu produktivitas beberapa komoditas pangan strategis. Meskipun demikian, kondisi ENSO yang berada pada fase La Nina lemah dan diperkirakan bertahan hingga pertengahan tahun 2026 yang dapat mendukung produktivitas komoditas pangan. Selain itu, Pemerintah kembali berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sebesar 720 ribu ton kepada sekitar 18 juta PBP secara nasional yang akan disalurkan selama empat bulan pertama pada tahun 2026, sehingga turut menopang daya beli masyarakat dan menahan tekanan permintaan di pasar. Selain itu, keberlanjutan program SPHP beras dengan peningkatan batas maksimal pembelian menjadi 25 kg per konsumen, serta penyaluran Minyakita diperkirakan mampu menjaga kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas tersebut. Namun demikian, risiko inflasi pangan masih perlu dicermati, seiring prakiraan BMKG bahwa Sulsel peralihan iklim La Nina Lemah ke El Nino Lemah, berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, khususnya di Sidrap dan Luwu Utara sebagai sentra padi, serta Enrekang sebagai sentra bawang merah, sehingga dapat memicu fluktuasi harga komoditas segar. Di sisi lain, kondisi ekonomi dan tensi geopolitik global berpotensi memberikan tekanan terhadap beberapa komoditas dan rantai pasok global.

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga. Pemerintah berkomitmen mendukung pencapaian swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), peningkatan infrastruktur pertanian, serta modernisasi sektor agribisnis. Penguatan produksi dan serapan beras terus didorong, sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2026 serta rencana peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, yang diharapkan mendukung stabilitas harga beras. Dalam konteks Sulawesi Selatan, dukungan penguatan hulu pertanian tercermin dari alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 846.721 ton, meningkat 27,65% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi didukung oleh program Mandiri Benih yang kembali berjalan pada 2026 dengan total penyaluran benih padi unggul sebanyak 2,31 juta kg, meningkat 84,8% dari alokasi tahun 2025 sebanyak 1,25 juta kg. Bantuan benih tersebut akan diberikan secara gratis kepada petani di seluruh kab/kota se-Sulsel dengan total luasan lahan penerima sebesar 92.334 Ha, meningkat 84,69% dari alokasi tahun 2025 sebesar 50.000 Ha. Selain itu, penetapan kebijakan dan insentif pemerintah melalui penguatan regulasi dan insentif fiskal, antara lain pengetatan implementasi DMO Minyakita minimal 35% melalui Permendag No. 43 Tahun 2025, peningkatan batas maksimal penyaluran beras SPHP menjadi 25 kg (5 pax) per konsumen, serta perluasan SPHP jagung guna memperkuat pasokan dan stabilitas harga pangan, serta pemberian insentif PPN DTP 100% untuk pembelian properti berdasarkan PMK No. 90 Tahun 2025. Sementara itu, pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan

Mutu Pangan (Satgas SABER) melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 4/2026 memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan harga dan mutu komoditas strategis, sehingga diharapkan harga pangan lebih terkendali dan tekanan inflasi dapat diredam. Selanjutnya, upaya pengendalian harga oleh TPID se-Sulawesi Selatan tetap dilaksanakan dalam kerangka strategi 4K sepanjang tahun 2026, melalui implementasi berbagai program unggulan GPIPS, seperti operasi pasar, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), *urban farming*, pengembangan klaster pangan, *High Level Meeting* (HLM), serta penguatan kelancaran distribusi. Sinergi kebijakan tersebut diperkirakan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pasokan pangan diperkirakan terjaga seiring upaya pengendalian harga oleh TPID dalam kerangka strategi 4K disertai dengan program unggulan GNPIP, yakni operasi pasar, Kerjasama Antar Daerah, *urban farming*, pengembangan klaster, *High Level Meeting*, dan kelancaran distribusi. Kegiatan Gelar Pangan Murah dan *Mini Distribution Center* (MDC) juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun dengan melibatkan distributor komoditas pangan.

Strategi khusus sebagai upaya menjaga stabilisasi harga di Sulsel kedepan, antara lain :

1. Melaksanakan GPM dgn prinsip “4T” - tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat komoditas secara masif dgn fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi pd HBKN RAFI dan berada di atas HET, seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.
2. Mengoptimalkan KAD utk komoditas utama penyumbang inflasi dgn memanfaatkan data neraca pangan & prakiraan BMKG, menyiapkan *buffer stock* sbg antisipasi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, serta menerbitkan Perda terkait Cadangan Pangan untuk menjaga ketahanan pasokan.
3. Memastikan kelancaran distribusi dan penyerapan beras SPHP dan Minyakita melalui koordinasi Bulog dan Pemda/Pemkot, khususnya pada daerah defisit dan berada di atas HET.
4. Mendorong penggunaan BTT untuk bantuan ongkos angkut komoditas inflasi, mendorong *moral suation* & komunikasi publik Belanja Bijak, dan mengoptimalkan program *urban farming* untuk menanam barito (bawang, rica/cabai, tomat) di lahan/pekarangan kosong.
5. Melanjutkan Program Mandiri Benih dan penyediaan bibit unggul, serta optimalisasi lahan kosong melalui program *urban farming* untuk komoditas bawang merah, rica/cabai, tomat (barito) di pekarangan, lahan sekolah, dan pesantren guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
6. Memanfaatkan teknologi pascapanen, seperti sinar gamma dan ozonisasi guna memperlambat pembusukan produk hortikultura.
7. Menyediakan *cold storage* di lokasi pendaratan ikan (PPI) serta pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan hasil tangkapan.

Mendorong kerja sama antara petani dan *offtaker* melalui pola kontrak yang disupervisi pemerintah daerah, guna memastikan penyerapan hasil produksi dan stabilitas harga.

9. Melakukan pengkinian Website Neraca Pangan oleh Pemerintah Kota/Kab dengan data yang andal (*reliable*) dan terkini (*timely*), khususnya dalam pencatatan arus keluar komoditas pangan, guna mendukung perumusan kebijakan yang efektif dan dasar faktual untuk melakukan kerja sama ketahanan pangan antar daerah.
10. Menambah pasokan dan memastikan kelancaran distribusi Minyak Kita karena hampir seluruh kab/kota di Sulsel berada di atas